

Ketahanan Pangan dan Ketahanan Bangsa

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

***Keynote Speech* pada Seminar:**

“Pengembangan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal”

Bandung, 26 November 2005

Pendahuluan

- Dalam rangka Dies Natalies ke-45 Universitas Pasundan, saya diminta untuk menjadi pembicara kunci dalam seminar yang bertema “Pengembangan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal”.
- Dalam pengertian kita, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, serta pembuatan makanan atau minuman.
- Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Menurut FAO (1993), ketahanan pangan berarti “akses bagi semua penduduk atas makanan yang cukup untuk hidup sehat dan aktif”. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional merupakan agregat dari ketahanan pangan rumah tangga. Strategi pembangunan pangan di masa depan disusun berdasarkan pengertian tersebut.

- Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa konsep ketahanan pangan ini tidaklah harus sama artinya dengan konsep swasembada pangan. Untuk negara-negara seperti Taiwan dan Singapura yang mempunyai tingkat konsumsi yang relatif kecil tidak diperlukan swasembada pangan untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yang tangguh. Kebutuhan pangan dari negara-negara tersebut dapat dipenuhi dari perdagangan dunia dengan mudah.

- Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu **ketersediaan pangan** dan **aksesibilitas** masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun stok pangan cukup tersedia di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan dikatakan rapuh.
- Sejarah membuktikan, negara yang sukses melakukan kemandirian pembangunannya, sedikit banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam bidang ketahanan pangan, genuinitas dalam melakukan proses demokratisasi baik sosial-ekonomi maupun politik, serta pengentasan kemiskinan.

Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia

- Program ketahanan pangan telah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno dengan Program Berdikari, begitu pula zaman Presiden Soeharto dikenal dengan Program Swasembada Pangan.
- Indonesia sempat dikenal sebagai negara dunia ketiga yang sukses dalam swasembada pangan, dan bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari FAO. Di penghujung tahun 1980-an, Bank Dunia memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan yang patut menjadi contoh bagi negara-negara sedang berkembang (World Bank,1990). Namun prestasi ini tidak berlangsung lama dapat dipertahankan.
- Kondisi saat ini, pemenuhan pangan sebagai hak dasar masih merupakan salah satu permasalahan mendasar dari permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 menggambarkan masih terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, yaitu belum terpenuhinya pangan yang layak dan memenuhi syarat gizi bagi masyarakat miskin, rendahnya kemampuan daya beli, masih rentannya stabilitas ketersediaan pangan secara merata dan harga yang terjangkau, masih ketergantungan yang tinggi terhadap makanan pokok beras, kurangnya diversifikasi pangan, belum efisiennya proses produksi pangan serta rendahnya harga jual yang diterima petani, masih ketergantungan terhadap import pangan.

- Data yang digunakan MDGs dalam indikator kelaparan, hampir dua-pertiga dari penduduk Indonesia masih berada di bawah asupan kalori sebanyak 2100 kalori perkapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kecukupan kalori, di samping menjadi permasalahan masyarakat miskin, ternyata juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya yang berpendapatan tidak jauh di atas garis kemiskinan.
- Dari pemberitaan diberbagai media masa, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami rawan pangan. Misalnya, selama tahun 2005 ini di NTB diketemukan ada 22 Balita Busung Lapar.
- Sampai saat ini, pangan beras masih menjadi pangan andalan. Bukan hanya sebagai komoditi yang memiliki fungsi ekonomi, akan tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global.

Ketahanan Pangan dan Demokrasi.

- Sesungguhnya ruh dari program ketahanan pangan adalah ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan secara adil dan merata. Ketersediaan mengandung nilai semangat produktifitas, adapun aksesibilitas mencakup bagaimana pemenuhan hak asasi serta keterjangkauan termasuk daya beli seluruh rakyat akan pangan. Produktifitas mengandung nilai kemandirian dan keberdayaan. Adapun pemenuhan hak asasi rakyat akan pangan berhubungan bagaimana proses demokratisasi pemerintahan berjalan dengan baik.
- Demokrasi membuka ruang publik agar rakyat berani mengemukakan pendapat, keluhan dan masalahnya dalam koridor norma hukum yang berlaku. Demokrasi juga membuka ruang untuk membangun tata kelola pemerintahan atas dasar partisipasi rakyat, egalitarian, transparansi, dan akuntabel.
- Dengan demikian, demokrasi dipercaya merupakan salah satu solusi akseptabilitas pembangunan ketahanan pangan.
- Demokrasi yang genuin dapat diwujudkan apabila hak dasar akan pangan pada seluruh masyarakat sudah terpenuhi secara adil dan merata. Terdapat hubungan timbal balik antara ketahanan pangan atau perkembangan kemajuan ekonomi dengan kualitas demokrasi di suatu bangsa.
- Proses desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang keberlangsungan ketahanan pangan nasional dengan berbagai keunikan dan keanekaragaman hayati

dan budaya lokalnya. Dalam konteks otonomi daerah, ketahanan pangan nasional sangat ditentukan oleh ketahanan pangan di daerah.

- Semakin mandiri dan berdaya daerah dalam ketahanan pangannya, semakin memungkinkan kemandirian nasional dan keberdayaan nasional dalam ketahanannya pangannya.
- Prakarsa dan inovasi program ketahanan pangan hanya dapat berkembang dengan baik, tatkala demokratisasi pemerintahan di daerah dengan berbagai kearifannya berjalan dengan baik yang memadukan tuntutan kebutuhan lokal-regional-nasional dan global.

Ketahanan Pangan dan Kemandirian

- Globalisasi, merupakan tantangan yang harus dihadapi. Kemampuan kita mengubah tantangan ini menjadi peluang, akan sangat tergantung dari cara pandang kita dalam menghadapinya. Kaitannya dengan ketahanan pangan adalah bagaimana mensinergikan aneka ragam hayati lokal sebagai sumber pangan dengan tuntutan kebutuhan pasar global.
- Desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang manajemen pembangunan, termasuk program ketahanan pangan, untuk dapat tumbuh atas prakarsa dan inovasi daerahnya masing-masing dengan berbagai kearifannya. Pada era otonomi daerah ini, aneka ragam budaya dan hayati lokal merupakan peluang untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- Tuntutan kebutuhan pasar global akan pangan bukan hanya dari seberapa cukup dan tersedia pangan, akan tetapi sejauhmana kualitas kesehatan pangan yang aman dan bergizi. Kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar global kembali ke alam merupakan peluang untuk melakukan kemandirian pembangunan perdesaan sekaligus sebagai momentum untuk melakukan pemberdayaan petani kita yang semula sangat tergantung pada asupan produk kimiawi dan monokultur (beras) menuju pertanian inovatif yang multikultur.
- Konsep kemandirian dalam ketahanan pangan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Dengan demikian, masalah kemandirian tidak didasarkan pada paradigma ketergantungan yang banyak dibicarakan terutama di negara-negara berkembang di Amerika latin tahun 1950 dan 1960-an.

- Kemandirian dalam konteks kini (*global*) menuntut adanya kondisi saling ketergantungan (*interdependency*) antara lokal-global, traditional-modern, desa-kota, rakyat-pemerintah, pertumbuhan-pemerataan, serta antar lembaga sesuai fungsinya. Kemandirian dengan demikian adalah paham pro-aktif dan bukan reaktif atau defensif.
- Kemandirian pembangunan perdesaan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional hanya dapat terwujud bila kondisi saling ketergantungan tersebut dibangun atas dasar kekuatan modal sosial yang tinggi. Budaya *silih-asih, silih-asah, silih-asuh, gotong-royong, ulah pareumeun obor, tikaacak ninggang batu laun-laun jadi legok, kudu nyaah ka sasama, ulah poho ka karuhun jeung ka-anak incu*, serta *ngajaga amanah* sesungguhnya merupakan nilai-nilai dalam transformasi sistem pembangunan pertanian masa datang yang tuntutannya lebih holistik.
- Kemandirian ketahanan pangan dalam era globalisasi hanya dapat diwujudkan tatkala paradigma pembangunan yang dikembangkan baik di pusat maupun di daerah mampu memadukan antara tuntutan global dengan pemberdayaan masyarakat. Di sinilah fungsi dan peran **demokratisasi ekonomi-politik dan sosial** pada semua tingkatan pemerintahan dan lembaga masyarakat menjadi sangat penting apakah arus globalisasi ini merupakan peluang untuk menjadi suatu kekuatan atau ancaman. Sesungguhnya para pendiri negara kita telah mencanangkannya 60 tahun yang lalu, yaitu tertuang dalam pasal 27 ayat (2) dan 33 ayat (4) UUD 1945.

Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan.

- Tidak ada suatu kemandirian tanpa proses pemberdayaan. Pemberdayaan berarti memampukan masyarakat dan pemerintah daerah dalam aspek material, intelektual, moral dan manajerial.
- Pemberdayaan dalam program ketahanan pangan berarti pula proses sistematis, berkesinambungan dan terpadu dalam sistem ketahanan pangan yang berakarkan kekuatan rakyat serta kearifan budaya lokal untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan pangan secara nasional dan global.
- Untuk pemaparan lebih lanjut tentang pemberdayaan, saya kutip kembali kisi-kisi pemberdayaan dalam buku yang saya tulis tahun 1996 diterbitkan oleh CIDES berjudul **Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.**

1. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 “Tiap-Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Demokrasi ekonomi mengandung nilai azas kekeluargaan, kemakmuran masyarakat diutamakan bukan orang seorang. Demokrasi ekonomi merupakan mandat dalam UUD 1945.
3. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi dalam menjalankan pembangunan yang berakarkan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial. Bersifat “*People-centered, participatory, empowering and sustainable*” (Chambers,1995).
4. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sebuah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik, mental, terdidik dan kuat, juga memiliki nilai-nilai intrinsik lainnya dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan yaitu kekeluargaan, kegotongroyongan dan kebhinekaan.
5. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari ketahanan nasional yaitu memampukan dan memandirikan masyarakat.
6. Pemberdayaan adalah penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*).
7. Pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.
8. Friedmann (1992) menyatakan “*the empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-marking of territorially organized communities, local-self reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy and experiential social learning.*”
9. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem yang tidak mengindahkan partisipasi politik rakyat, cenderung menghasilkan kesenjangan, yakni kesenjangan antara yang memperoleh kesempatan dan tidak memperoleh kesempatan dalam sistem yang tertutup.
10. Pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti yang dikatakan oleh *Donald Brown (1995)*, keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible or*

antithetical". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "zero-sum game" dan "trade off". Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), "The Pattern of growth is just as important as the rate of growth". Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, "the right kind of growth", yakni bukan yang vertikal menghasilkan "trickle-down", seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni "broadly based, employment intensive, and not compartmentalized" (Ranis,1995).

11. Hasil pengkajian *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar.
12. Dalam memecahkan problematika kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, selain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga diperlukan upaya pembaharuan sosial.
13. Upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat, dengan cara ditingkatkan kemampuannya, serta dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya (harkat-martabat-rasa percaya diri dan harga dirinya).

Penutup

- Pada bagian akhir pemaparan ini. Saya berharap, momentum seminar ini merupakan bagian dari refleksi untuk membangun kemandirian ketahanan pangan dalam menghadapi tantangan global, di saat kita sedang gencar-gencarnya melaksanakan proses otonomi daerah.
- Mudah-mudahan seminar ini akan mampu memberikan solusi program ketahanan pangan dengan memadukan strategi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah yaitu memadukan kepentingan capaian makro dengan capaian kebutuhan mikro, sistem produksi berorientasi pasar yang ramah lingkungan, kemampuan membangun sinergi jaringan kelembagaan ekonomi kerakyatan dengan kelembagaan global, serta memperkuat tatanan kelompok masyarakat yang bergerak dalam ketahanan pangan dengan basis nilai madani.

Utamanya bagaimana membangun transformasi budaya pertanian yang mandiri untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan nasional di era global dan otonomi daerah ini.

- Selamat berseminar, semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Amiin. Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandung, 26 November 2005